

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Akuntabilitas dan keterbukaan berpengaruh dalam pelaksanaan *good governance* Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kendala yang dihadapi Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kendala-kendala dalam mewujudkan *good governance*, birokrasi yang berbelit-belit, kemacetan jalan, pembangunan yang belum merata, dan kesenjangan sosial
3. Upaya Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat telah dalam mengatasi berbagai upaya dalam mewujudkan *good governance*, antara lain reformasi birokrasi, mencegah kemacetan jalan, pemerataan pembangunan, dan mengantisipasi kesenjangan sosial.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan:

1. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat agar lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan birokrasi bagi masyarakat.
2. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat agar meningkatkan pemerataan pembangunan hingga pinggiran kota
3. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan,

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Bagir Manan, 1994, *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta
- Chandler dan Plano. 2004. dalam Yeremias T. Keban. Enam dimensi strategis administrasi publik konsep, teori dan isu. Gava Media: Yogyakarta
- Dwi Martani dkk, 2014, *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK*, Salemba Empat, Jakarta
- Gortner, H. F., K. L. Nichols, dan C. Ball. 2007. organization theory: a public and nonprofit perspective, 3rd edition. Thompson Wadsworth. Belmont, CA
- H. R. Sjahnan, 2000, *Pelaksanaan tata pemerintahan dan otonomi menurut UUD 1945 di Indonesia*, Penerbit Monora, Medan
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*, Grasindo, Jakarta
- Haris Hardiansyah, 2010, *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Salemba Humanika, Jakarta
- Harsono, 1992, *Hukum tata negara: pemerintahan lokal dari masa ke masa*, Liberty, Yogyakarta
- Husni Jalil, 2017, *hukum pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi khusus*, CV Social Politic Genius, Makassar
- J Kaloh, 2002, *Mencari bentuk otonomi daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Koeswara, E. 1991. Teori-teori kepribadian: psikoanalisis, behaviorisme, humanistik. Bandung: Eresco.
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*, Penerbit Gama Media, Jakarta
- Mas'ud Said, 2008, *Arah baru otonomi daerah*, UMM Press, Malang
- Muluk Khairul, 2009, *Peta konsep desentralisasi & pemerintahan daerah*, ITS Press, Surabaya

Murtir Jeddawi, 2011, *negara hukum, good governance, dan korupsi di daerah*, Total Media, Yogyakarta

Nasution, P S. 2008. Implikasi tata pemerintahan yang baik (good governance) terhadap efektivitas perencanaaan pembangunan. Jurnal. Universitas Sumatera Utara: Medan.

Sarundajang, 2002, *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*, Pustaka Sinar hrapan, Jakarta

Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah*, Fokus Media, Bandung

Schacter, M. 2000. When accountability fails : a framework for diagnosis and action. Institut on Governance, Canada

Sedarmayanti, 2003, *Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.

Wahyudi, dkk, 2002, Etnik Pakpak, *Fenomena pemekaran daerah*, The Asia Foundation & Yayasan Sada Almo, Sidikalang

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal-jurnal

Alcaraz-Quiles, Francisco J., Andrés Navarro-Galera, and David Ortiz-Rodríguez, ‘Factors determining online sustainability reporting by local governments’, *International Review of Administrative Sciences*, 81.1 (2015), <<https://doi.org/10.1177/0020852314541564>>

Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, Welson Yappi Rompas, ‘Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di kantor camat Kormomolin

Kabupaten Maluku Tenggara Barat', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.37 (2016), 1–9

Fauzi, Achmad, 'Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019), 119 <<https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>>

Lekipiouw, Sherlock Halmes, 'Konstruksi penataan daerah dan model pembagian urusan pemerintahan', *Sasi*, 26.4 (2020), 557 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>>

Muhtar, Deni Ariyanto Putro, and Sutaryo, 'Jurnal akuntansi & auditing indonesia penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21.2 (2017)

Munawaroh, Nunung, 'Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik', *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No. (2019), 143–56

Nani, Ferdelince Lunga, Hyronimus Rowa, and Ani Martini, 'Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Sumba Timur', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6.1 (2021), 102–11 <<https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1738>>

Ningrum, Elvira Dwi, and Hasim As'ari, 'Akuntabilitas pemerintah daerah dalam memfungsikan pasar modern', *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2.2 (2021), 206–24 <<https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p206-224>>

Prasetya, Dimas Aldiansyah, I Putu Dharmanu Yudartha, and Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, 'Akuntabilitas sektor publik pemerintah kabupaten badung dalam pemberian hibah kelompok atau masyarakat tahun 2018', *Citizen Charter*, 1.1 (2020), 1–14

Ristyana Ria, 'Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah kabupaten Ponorogo', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2016), 1689–99

Rosalia, Rosalia, and Pingky Dezar Zulkarnain, 'Pengaruh akuntabilitas, potensi daerah dan aset daerah terhadap transparansi pemerintah daerah', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8.2 (2020), 167–76 <<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i2.375>>

Sasmita, Putu Arik Gita, Made Fery Cahyadi, Ni Luh Febry Sukma Andriyani, Kadek Nety Mutiari, and Ni Putu Sriyati, 'Pengelolaan manajemen kinerja pada satuan kerja perangkat dinas dengan menggunakan sistem terpadu berbasis e-sakip (studi kasus di dinas pendapatan kab. Buleleng)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8.3 (2019) <<https://doi.org/10.23887/jinah.v8i3.20022>>

Shahib, Habib Muhammad, Muhammad Ridwan Hasanuddin, Yasmi Nurdin, Siprianus Palete, Fenny Mika, and Reski Rahayu Saputri, ‘Akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah di era covid-19 pada website pemerintah daerah se-Indonesia’, *Jurnal Transformative*, 8.1 (2022), 102–27 <<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5>>

Wicaksono, Kristian Widya, ‘Akuntabilitas organisasi sektor publik’, *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19.1 (2015), 17 <<https://doi.org/10.22146/jkap.7523>>

Zawawi, M., ‘Model Akuntabilitas kinerja skpd dalam mewujudkan good governance’, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1.1 (2016), 8–13

D. Sumber Lainnya

BKSI, “Mencari format dan konsep transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” disajikan pada seminar “menciptakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah: memberdayakan momentum reformasi”, forum inovasi dan kepemerintahan yang baik, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001

Krina, Loina Lalolo, 2003, *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta

<http://www.setkab.go.id>

www.sumbarprov.go.id